

---

## PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN DI KOTA MEDAN

Oleh :  
Ermidawati  
Universitas Negeri Medan

### ABSTRAK

Dalam peningkatan mutu pendidikan kejuruan telah pula digariskan kebijakan mengenai pemerataan kesempatan pendidikan yang bukan hanya menambah fasilitas pendidikan secara kuantitatif, melainkan juga keseluruhan komponen secara kualitatif. Dengan kata lain adalah pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Termasuk dalam kebijakan ini adalah pengembangan pendidikan kejuruan (SMK).

Pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau bidang-bidang pekerjaan lainnya. Ketika seorang siswa masuk pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka siswa tersebut mampu memperoleh pengetahuan dan bagaimana dapat mengembangkan potensi dirinya.

Pola pendidikan di SMK seyogyanya dikemas dalam bentuk paket keterampilan yang berlapis dan berjenjang, dengan menerapkan prinsip *multi entry-multi exit*. Pola ini memungkinkan siswa SMK yang telah memiliki sejumlah satuan kemampuan tertentu (karena program pengajarannya berbasis kompetensi), mendapatkan kesempatan kerja di dunia kerja, maka siswa tersebut dimungkinkan meninggalkan sekolah. Dan kalau siswa tersebut ingin masuk sekolah kembali menyelesaikan program SMK-nya, maka sekolah harus membuka diri menerimanya, dan bahkan menghargai dan mengakui keahlian yang diperoleh siswa yang bersangkutan dari pengalaman kerjanya.

### Latar Belakang

Mutu pendidikan merupakan masalah yang dijadikan agenda utama untuk diatasi dalam kebijakan pembangunan pendidikan, karena hanya dengan pendidikan yang bermutu akan diperoleh lulusan bermutu yang mampu membangun diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, telah menggariskan ketentuan minimum bagi satuan pendidikan formal agar dapat memenuhi mutu pendidikan.

Sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan telah pula digariskan kebijakan mengenai pemerataan kesempatan pendidikan yang bukan hanya menambah fasilitas pendidikan secara kuantitatif, melainkan juga keseluruhan komponen secara kualitatif. Dengan kata lain adalah pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Termasuk dalam kebijakan ini adalah pengembangan pendidikan kejuruan (SMK).

Pendidikan kejuruan merupakan program strategis untuk menyediakan tenaga kerja tingkat menengah. Namun kenyataan menunjukkan bahwa program ini kurang menarik perhatian kebanyakan orangtua dan anak-anaknya, terutama dari golongan ekonomi menengah ke atas. Demikian juga siswa yang prestasi akademiknya tinggi cenderung tidak memilih pendidikan kejuruan, melainkan pendidikan umum yang lebih leluasa untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi. Usaha untuk menarik minat masyarakat termasuk remaja lulusan pendidikan dasar, untuk memasuki sekolah kejuruan memang perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Usaha tersebut tidak cukup hanya dengan melakukan promosi dengan misalnya mencetak dan menyebarkan informasi. Tetapi harus terlebih dahulu ditunjukkan hasil yang bermutu dan berdayaguna.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pengkajian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan kemudian menganalisis apakah realitas lapangan mengenai perkembangan pendidikan kejuruan sudah sesuai dengan pendapat para-pakar dalam bidang yang bersangkutan, dengan kebutuhan di lapangan kerja, dan dengan hasil kajian pustaka yang dilakukan. Obyek utama kajian ini adalah sekolah kejuruan yang terutama menyelenggarakan program pendidikan yang mengarah kepada pemberdayaan perempuan, yaitu program tata busana, tata rias, dan tata boga.

Secara operasional kajian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut : 1. Apakah kurikulum pendidikan kejuruan yang dimaksud sudah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan perkembangan lingkungan ?; 2. Apakah berbagai komponen dalam pelaksanaan sistem pembelajaran, termasuk proses pembelajaran, sarana-prasarana, pengelolaan, dan penilaian, telah dikembangkan sesuai dengan tuntutan pembangunan pendidikan ? ; 3. Apakah program pembelajaran telah menghasilkan lulusan yang kompeten untuk memasuki dunia kerja ? ; 4. Apakah program kejuruan yang dikembangkan sudah sesuai dengan pendapat para pakar dalam bidang yang bersangkutan ? ; 5. Seberapa jauh para lulusan sudah disiapkan untuk mandiri ? ; dan 6. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung terselenggaranya program pembelajaran yang bermutu ?

## LANDASAN PEMIKIRAN

### a. Konsep Dasar Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau bidang-bidang pekerjaan lainnya. Ketika seorang siswa masuk pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka siswa tersebut mampu memperoleh pengetahuan dan bagaimana dapat mengembangkan potensi dirinya. Santoso (1979), menegaskan bahwa tujuan sekolah yang mendasar adalah mengembangkan semua bakat dan kemampuan siswa, selama proses pendidikan hingga mencapai tingkat. Sedangkan (Snow, 1986), menyatakan bahwa perbedaan individual antara siswa disekolah meliputi perbedaan kemampuan kognitif, motivasi berprestasi, minat dan kreativitas, dan dengan adanya perbedaan individu tersebut, maka fungsi pendidikan tidak hanya dalam proses belajar mengajar tetapi meliputi bimbingan konseling, pemilihan dan penetapan siswa sesuai dengan kapasitas individual yang dimiliki.

Lebih lanjut Snow (1986) menyatakankan bahwa penjurusan siswa disekolah menengah tidak saja ditentukan oleh kemampuan akademik tetapi dapat didukung oleh faktor minat, karena karakteristik suatu ilmu menuntut karakteristik yang sama dari yang mempelajarinya. Dengan demikian, siswa yang mempelajari suatu ilmu yang sesuai dengan karakteristik kepribadiannya (minat terhadap suatu ilmu tertentu) akan merasa senang ketika mempelajarinya serta faktor kepribadian mempengaruhi secara positif prestasi akademik, sebab penjurusan bukan masalah kecerdasan tetapi juga masalah minat dan bakat siswa.

Pohar, dkk (2004), menyarankan bahwa analisis diskriminan linear lebih tepat dipergunakan dibandingkan dengan regresi logistik bila asumsi distribusi normal multivariat terpenuhi. Asumsi distribusi normal multivariat merupakan hal yang penting dalam analisis diskriminan untuk didapatkannya ketepatan klasifikasi yang tinggi. Suatu studi menunjukkan bahwa dengan menggunakan regresi logistik multinomial dapat mengkategorikan beberapa negara berdasarkan pada *political risk* dan *economic risk*. *Gross National Income* dan *economic freedom index* merupakan dua faktor yang digunakan sebagai ukuran finansial untuk mengembangkan model regresi logistik multinomial. Fungsinya adalah untuk mengevaluasi probabilitas sebuah negara memiliki karakteristik investasi yang menguntungkan ataukah investasi luar negeri (McGowan dan Moeller, 2004).

Menurut Permadina (2008), bahwa dalam penetapan jurusan SMA berdasarkan regresi logistik Multinomial dan Regresi logistik Multinomial dengan metode Bayesian. Dua metode ini akan dibandingkan untuk mengetahui misklasifikasi yang diperoleh. Variabel independen seorang siswa diperhitungkan masuk ke jurusan tertentu antara lain nilai ketuntasan siswa pada setiap bidang di semester terakhir kelas X, IQ dan minat siswa.

Mulyoto (2007), menjelaskan bahwa dalam melakukan penjurusan siswa berdasarkan rata-rata nilai MIPA, IPS dan Bahasa, terlihat dalam satu jurusan memiliki kedekatan sifat sedangkan dengan metode yang dilakukan sekolah terlihat acak, siswa tidak dijuruskan menurut kemiripan dalam kemampuannya. Siswa dalam satu jurusan tidak mengelompok, tetapi membaaur dengan siswa-siswa dalam jurusan lain. Berdasarkan berbagai teori tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam melakukan penjurusan terhadap siswa tidak hanya berdasarkan keinginan guru serta keinginan orang tua dalam mengarahkan anak pada jurusan yang ada Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa pendidikan kejuruan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan umum, Menurut Finch & Crunkilton (1984), ada 7(tujuh) criteria yang harus dimiliki oleh Pendidikan Kejuruan, yaitu: (1) berorientasi pada kinerja individu dalam dunia kerja; (2) memiliki justifikasi (pembenaran) khusus pada kebutuhan nyata di lapangan; (3)

kurikulumnya berfokus pada aspek-aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif; (4) tolak ukur keberhasilan tidak hanya terbatas di sekolah; (5) memiliki kepekaan terhadap perkembangan dunia kerja; (6) membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai; dan yang ke (7) adanya dukungan dari masyarakat. Sementara itu, Nolker dan Shoenfeldt (1983) menyatakan bahwa dalam memilih substansi pelajaran, pendidikan kejuruan harus selalu mengikuti perkembangan IPTEK, kebutuhan masyarakat, kebutuhan individu, dan lapangan kerja.

Bila dilihat dari lulusannya, Butler (1979) menjelaskan bahwa kriteria lulusan pendidikan kejuruan haruslah memiliki kecakapan: (1) minimal, pengetahuan dan keterampilan khusus untuk jabatannya; (2) minimal, pengetahuan dan keterampilan sosial, emosional, dan fisik dalam kehidupan sosial; (3) minimal, pengetahuan dan keterampilan khusus dasar; dan (4) maksimal, kejujuran umum, sosial, serta pengetahuan dan keterampilan akademik, untuk jabatan, individu, dan masa depannya. Uraian diatas mengingatkan kita pada perbedaan antara dua macam pendidikan yaitu pendidikan umum (*liberal arts education*) yang mengarahkan pada pengetahuan dan kebebasan berpikir, dan pendidikan kejuruan (*vocational education*) yang menekankan pada penyiapan dan penyesuaian dengan masyarakat/dunia kerja. Masing-masing memiliki visi, misi, dan tujuan yang berbeda.

### **b. Pandangan Filosofis**

Secara filosofis, di dalam memandang pendidikan kejuruan, terdapat dua pertanyaan yang menyangkut dasar pengembangan program pendidikan kejuruan yaitu: apa yang harus diajarkan, dan bagaimana harus mengajarkannya (Calhoun dan Finch, 1982). Kedua pertanyaan tersebut mengundang jawaban tentang prioritas yang harus ditentukan. Selanjutnya Calhoun dan Finch menyatakan bahwa, asumsi dan prinsip-prinsip fundamental cenderung menyatukan dan mengarahkan perencanaan pendidikan kejuruan. Kemudian ditegaskan juga bahwa sumber prinsip-prinsip fundamental pendidikan kejuruan adalah individu dan perannya dalam suatu masyarakat yang demokratis, serta peran pendidikan dalam transmisi standar sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tujuan puncak system pendidikan kejuruan adalah memaksimalkan kesempatan individu untuk belajar sepanjang hayatnya serta untuk mencapai "kehidupan yang baik".

Chambers (1982), berpendapat bahwa proses pendidikan harus ditekankan pada aspek mental dan rasionalitas, sehingga terbina martabat yang mulia (*dignity*). Dengan kata lain, pendidikan merupakan aktivitas yang bernilai intrinsik, yaitu usaha pemberian perspektif kognitif dan rasionalitas kepada peserta didik, agar peserta didik memiliki martabat yang mulia.

Di dalam pandangan demokrasi, dimana pada awalnya konsep demokrasi ini mangacu pada sistem politik, akan tetapi dalam perkembangannya demokrasi juga digunakan pada semua system kemasyarakatan, termasuk pendidikan. John Dewey menyebutkan bahwa demokrasi adalah *way of life*, yang merupakan suatu keyakinan tentang kemungkinan sifat manusia (Nathanson, 1967). Dalam pandangan Dewey, demokrasi bukan hanya sistem politik, sistem ekonomi, atau sistem sosial secara terpisah, tetapi lebih merupakan suatu moral ideal, yang harus dijadikan pegangan dalam semua sistem kehidupan secara terintegrasi. Berbicara tentang pendidikan, Dewey menegaskan bahwa pendidikan haruslah mengutamakan keseimbangan kepentingan sosial, tidak semata-mata mementingkan produktivitas dan efisiensi saja.

Dari pandangan-pandangan di atas, maka sistem pendidikan kejuruan haruslah dapat menjamin terwujudnya masyarakat yang demokratis terutama dalam memperoleh kesempatan belajar dan kesempatan bekerja, agar setiap individu dalam masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik dan martabat yang mulia, melalui proses mental dan rasionalitas yang tinggi.

### **c. Pandangan Sosiologis**

Menurut Calhoun, Light, dan Keller (1997), dikatakan bahwa pendidikan memiliki dua fungsi pokok, yaitu fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifest pendidikan adalah mengajarkan mata pelajaran spesifik bagi peserta didik, seperti membaca, menulis, aritmatik, dan keterampilan akademik

lainnya. Sedangkan fungsi laten adalah mengajarkan keterampilan dan sikap sosial, seperti disiplin diri, kerjasama dengan orang lain, mentaati hukum, dan bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Calhoun, dkk. Menyatakan bahwa fungsi manifes dan fungsi laten tersebut memainkan peran yang vital dalam mewujudkan integrasi fungsional masyarakat, serta mempertahankan struktur sosial yang ada. Lebih rinci lagi, Calhoun, Light, dan Keller (1997) memaparkan tujuh fungsi sosial, yaitu: (1) mengajar keterampilan, (2) mentransmisikan budaya, (3) mendorong adaptasi lingkungan, (4) membentuk kedisiplinan, (5) mendorong bekerja berkelompok, (6) meningkatkan perilaku etik, dan (7) memilih bakat dan memberi penghargaan atas prestasi yang diraih Rogers, Burge, Korsching, dan Donnermeyer (1988), mendefinisikan pendidikan sebagai proses dimana suatu budaya (*culture*) secara formal ditransmisikan kepada si peserta didik. Budaya di sini diartikan sebagai aspek-aspek material dan non-material dari cara hidup yang dimiliki bersama dan ditransmisikan di antara anggota suatu masyarakat. Dalam pandangan ini pendidikan lebih mengacu kepada bentuk pembelajaran budaya (*cultural learning*) yang berfungsi sebagai transmisi pengetahuan, pengemongan manusia muda, mobilitas sosial, pembentukan jati diri, dan kreasi pengetahuan.

Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan transmisi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang memiliki fungsi manifes dan fungsi laten, guna mewujudkan integrasi fungsional serta untuk mempertahankan struktur sosial dalam suatu masyarakat.

#### **d. Pandangan Ekonomi**

Kontribusi pendidikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi terjadi melalui kemampuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang ada. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh investasi modal, tetapi juga tenaga kerja yang memiliki fleksibilitas dalam menguasai keterampilan baru untuk melaksanakan pekerjaan baru, sejalan dengan perubahan struktur ekonomi dan lapangan kerja (The World Bank, 1991). Sementara itu, Hicks (1991), menjelaskan bagaimana memahami kontribusi pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi, dengan cara mengetahui sebab-sebab pertumbuhan serta proses pertumbuhan itu sendiri. Menurut Hicks, para ahli ekonomi mengidentifikasi tiga faktor produksi, yaitu lahan, tenaga kerja, dan modal. Dalam proses pertumbuhan ekonomi, lahan diasumsikan tidak mengalami perubahan. Sehingga, dua faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja dan modal. Sebagai lembaga persiapan memasuki lapangan kerja, sebenarnya pendidikan kejuruan merupakan penerapan dari teori "human capital". Melalui investasi pada pendidikan kejuruan, maka diharapkan dapat menghasilkan balikan yang cukup baik, baik secara individual maupun sosial. Tentu saja untuk aspek ini efektivitas dan efisiensi program pendidikan kejuruan harus benar-benar dapat dibuktikan.

Namun dalam aspek ekonomi inilah justru SMK (sebagai salah satu bentuk dari pendidikan kejuruan) banyak mendapat sorotan. Banyak studi yang menunjukkan bahwa investasi pendidikan pada SMK memiliki *rate of return* lebih rendah dibanding SMU (Clark, 1983; Psacharopoulos, 1983). Dan hal itu kemudian yang memunculkan polemic apakah SMK perlu dipertahankan atau dihapus saja, karena beberapa bukti menunjukkan bahwa SMK tidaklah efisien. Ke depan pendidikan apapun jenisnya, termasuk SMK (pendidikan kejuruan) ditantang untuk mampu bersaing dengan lembaga lainnya. Pendidikan tidak lagi harus dipahami sebagai kegiatan layanan sosial (**public services**) semata saja, tetapi juga harus dipahami sebagai suatu bentuk layanan jasa, sebagaimana restoran, telekomunikasi, jasa konsultan, dan sebagainya.

Sallis (1993) menjelaskan secara baik bagaimana pendidikan dipahami sebagai bentuk layanan dan bukan sebagai bentuk fungsi produksi sebagaimana yang digunakan selama ini. Ke depan, pendidikan juga akan menjadi salah satu bentuk "industri". Semakin maraknya iklan sekolah, perguruan tinggi, kursus/pelatihan merupakan petunjuk terjadinya pergeseran pemahaman terhadap pendidikan. Bukankah iklan-iklan tersebut sebenarnya merupakan salah satu upaya dari lembaga pendidikan untuk menarik calon siswa/mahasiswa? Bahkan kini sudah muncul keinginan untuk secara terbuka menyatakan bahwa pendidikan merupakan bentuk industri mulia, sehingga selayaknya dikelola oleh sebuah perseroan dan bukan oleh sebuah yayasan. Pada era keterbukaan nanti, banyak lembaga pendidikan asing asing yang akan masuk ke Indonesia dalam berbagai bentuk.

Dengan penduduk yang lebih dari 200 juta, Indonesia dianggap merupakan pasar yang sangat potensial untuk berbagai produk, termasuk pendidikan. Pada saat inipun gejalanya sudah bermunculan. Berbagai pameran pendidikan asing sudah sering berlangsung di kota-kota besar di Indonesia. Bahkan sekarang juga sudah mulai muncul berbagai bentuk waralaba pendidikan luar negeri di Indonesia. Dan ternyata respons masyarakat terhadap "tawaran" pendidikan dari luar negeri ini sangat baik. Jumlah orang Indonesia yang bersekolah ke luar negeri, termasuk level sekolah menengah terus meningkat. Bahkan sekarang di Kalimantan Barat dan wilayah Sumatra bagian Utara (seperti Aceh, Sumut, Riau dan Sumbar) kini sedang terjadi arus anak bersekolah ke Malaysia dengan sangat deras. Iklan-iklan sederhana dari Malaysia, lengkap dengan informasi perbandingan biaya, membanjir ke wilayah tersebut.

## **METODE KAJIAN**

Mengingat banyaknya ragam pendidikan kejuruan, maka kajian ini dibatasi hanya pada satu kelompok program kejuruan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan perempuan. Obyek kajian ini adalah 2 SMK yang ada di Kota Medan yang dipilih secara sengaja (purposif). Pemilihan sekolah didasarkan pada kriteria: 1) Menyelenggarakan program kejuruan kelompok pariwisata yang dimaksudkan, yaitu yang meliputi program kejuruan tata boga, tata busana, tata kecantikan.

Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dilakukan klasifikasi penjurusan yang didasarkan variabel nilai UNAS Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Rata-rata nilai rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebagai variabel respon adalah jurusan yaitu Tata Busana, Boga dan Rias, sehingga berdasarkan data yang ada akan diperoleh ketepatan klasifikasi dengan pendekatan analisis diskriminan dan regresi logistik multinomial.

Pengkajian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Yang dideskripsikan adalah kenyataan lapangan sekolah dan lingkungannya. Deskripsi sekolah dan lingkungannya ini dapat juga dipandang sebagai pendekatan kasus jamak (*multiple case studies*), namun dapat juga termasuk sebagai pengkajian kebijakan sekolah yang bersifat eksplanatoris. Kedua sudut pandang tersebut digunakan dalam garis besarnya dalam pengkajian ini. Sedangkan pisau analisis dikembangkan dengan menggunakan hasil kajian kebijakan, kajian konseptual dan kajian empirik.

Pada setiap sekolah dikumpulkan data melalui kuesioner, observasi kelas, sekolah dan lingkungan, serta wawancara, diskusi terfokus (*focuss group discussion*=FGD) yang diikuti oleh beberapa unsur, yaitu: kepala sekolah, ketua jurusan, guru program studi, lulusan, dan mitra industri. Data dari sekolah yang telah dikumpulkan dan dianalisis kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan lima (5) orang pakar dalam bidang yang terkait.

## **PEMBAHASAN**

Temuan kajian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kurikulum pada sebagian besar SMK yang diteliti pada umumnya kurang lengkap. Dengan tidak lengkapnya dokumen kurikulum tersebut diragukan apakah pengembangannya telah disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja yang menuntut tenaga kerja yang mampu mengikuti perkembangan yang dinamis dalam lingkungan kerja.
2. Tiap SMK telah memperoleh anggaran yang cukup memadai untuk pengembangan kurikulum tetapi tidak terungkap seberapa jauh dilakukan kerjasama antar sekolah. Kurikulum pada beberapa sekolah menunjukkan kesamaan yang besar, padahal kondisi dan lingkungan sekolah berbeda. Dalam seminar yang diselenggarakan juga terungkap bahwa peran dan keterlibatan dunia usaha dan industri dalam pengembangan kurikulum juga belum diwujudkan secara optimal.
3. Usaha sekolah untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan ternyata tidak hanya melalui "satu pintu", karena ada beberapa proyek yang memberikan kesempatan bagi sekolah-sekolah untuk mengajukan proposal. Pada beberapa sekolah yang dikunjungi ternyata ada duplikasi dalam pengadaan sarana pembelajaran. Demikian pula ada satu sekolah yang mendapat alokasi sarana untuk suatu laboratorium produktif tertentu, tetapi belum dapat difungsikan karena tenaga gurunya masih belum siap.



4. Proses pembelajaran pada umumnya telah memenuhi persyaratan dengan memberikan porsi praktikum yang cukup. Namun praktikum tersebut hanya diberikan dalam mata pelajaran keterampilan produktif. Untuk pelajaran keterampilan intelektual seperti matematik dan sains, tidak terungkap adanya praktikum berupa belajar pemecahan masalah, belajar berbasis proyek dan sebagainya.
5. Metode penilaian yang otentik dengan menggunakan instrumen berupa rubrik dan portofolio belum terungkap bukti pelaksanaannya. Analisis dokumen SAP atau RPP belum menunjukkan adanya bentuk penilaian tersebut.
6. Kompetensi lulusan masih berorientasikan pada kebutuhan lapangan kerja masa sekarang atau bahkan masa lalu, dan belum membuka wawasan ke masa mendatang. Perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi yang telah memicu globalisasi, baru sekedar diketahui dan dioperasikan, belum dimanfaatkan untuk keperluan belajar atau untuk mencari informasi yang berkaitan dengan perkembangan lingkungan kerja. Kemandirian sebagai salah satu kompetensi yang perlu dikuasai, belum tampak usaha pengembangannya. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam menghadapi situasi yang senantiasa berubah.

Berdasarkan temuan tersebut direkomendasikan hal-hal berikut :

1. SMK perlu dikembangkan sebagai organisasi belajar, yaitu dengan mengembangkan diri secara terus menerus sesuai dengan perkembangan lingkungan (sosial, budaya dan teknologi), dan berpegangan pada azas organisasi belajar. Program sosialisasi Pendidikan Kejuruan perlu dilakukan lebih gencar dengan cara menampilkan profil lulusan pada berbagai program/jurusan.
2. Perlunya dibangun kerja sama yang harmonis dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta berbagai pihak swasta yang memerlukan tenaga kerja terampil. Kerjasama tersebut diharapkan dapat mengubah sistem pendidikan dari *output oriented* menjadi *job oriented* sehingga angkatan kerja yang baru sudah siap masuk ke pasar kerja.
3. Untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai, mandiri atau mampu berwirausaha SMK perlu melakukan usaha-usaha baik dibidang pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, dengan menyertakan DUDI dalam kegiatan sekolah. Pihak DUDI menyarankan agar SMK menambah guru yang sesuai dengan bidangnya dan perlu meningkatkan kompetensi dan wawasan agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan bidang keahlian yang diampunya.
4. Penilaian para pakar dan mitra industri terhadap kompetensi lulusan pendidikan kejuruan belum sepenuhnya memenuhi standar industri. Esensi dari lulusan SMK adalah tenaga kerja siap pakai pada level menengah, namun lulusan SMK secara umum belum mampu untuk itu, karena Lulusan SMK yang bekerja di industri masih harus dididik dan dilatih kembali sehingga memerlukan biaya tambahan. Beberapa pengusaha yang merekrut lulusan SMK dan SMU, menyatakan bahwa lulusan SMU jika dilatih juga akan memiliki keterampilan yang tidak jauh berbeda dengan lulusan SMK.
5. Sarana dan prasarana perlu dilengkapi untuk semua jurusan, termasuk pengadaan wahana pelatihan berbasis produksi (*teaching factory*) juga sudah diterapkan dalam kegiatan di setiap unit produksi. Untuk itu perlu ditentukan kebijakan satu pintu, sehingga tidak terjadi duplikasi dan/atau perhatian yang terfokus pada jurusan tertentu saja
6. Program kejuruan harus dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan, karakteristik peserta didik, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar lulusan dapat menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan kerja yang berkembang pesat, program pendidikan kejuruan perlu dikembangkan dengan basis pengetahuan dan teknologi yang luas. Program yang terlalu menjurus atau sempit, kurang sesuai lagi dengan tuntutan dunia kerja. Idealnya program dikembangkan tidak hanya berorientasi pada pengembangan keterampilan semata, tetapi juga berorientasi pada proses yang mengembangkan kemampuan berpikir logis, etis, dan estetis, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan lingkungan dan tuntutan dunia kerja.

7. Rencana penambahan jumlah SMK sehingga prosentasenya lebih banyak dari SMU perlu dipertimbangkan kembali. Perlu ditingkatkan lebih dahulu mutu pendidikan kejuruan, sehingga memenuhi seluruh ketentuan standar nasional pendidikan. Peningkatan mutu tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik pendidikan kejuruan, dan meningkatnya daya tarik tersebut baru dilayani dengan pengembangan satuan pendidikan.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa simpulan, yaitu: Ke depan kita memerlukan perubahan pola pikir terhadap SMK di Kota Medan. Pola pendidikan di SMK di Kota Medan seyogyanya dikemas dalam bentuk paket keterampilan yang berlapis berjenjang, dengan menerapkan prinsip *multi entry-multi exit*. Pola ini memungkinkan siswa SMK yang telah memiliki sejumlah satuan kemampuan tertentu (karena program pengajarannya berbasis kompetensi), mendapatkan kesempatan kerja di dunia kerja, maka siswa tersebut dimungkinkan meninggalkan sekolah. Dan kalau siswa tersebut ingin masuk sekolah kembali menyelesaikan program SMK-nya, maka sekolah harus membuka diri menerimanya, dan bahkan menghargai dan mengakui keahlian yang diperoleh siswa yang bersangkutan dari pengalaman kerjanya. Untuk dapat menerapkan pola tersebut, maka Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait rasanya sangat perlu untuk ditinjau ulang kembali. Pemilahan antara SMK dengan kursus keterampilan sudah saatnya dihilangkan.

Pola yang diajukan tersebut sangat mungkin akan "bertabrakan" dengan berbagai perangkat aturan yang selama ini ada dan bahkan dengan berbagai kepentingan. Untuk itu pada tahap awal, direkomendasikan untuk melakukan uji coba atau rintisan di beberapa SMK. Jika rintisan tersebut ternyata berhasil membuktikan keunggulannya, maka pola baru itu secara bertahap akan mengubah pola pikir kita dan pada saatnya dapat dijadikan landasan untuk mengubah aturan yang selama ini membelenggu SMK. Perlunya pemerataan dan penambahan guru SMK di Kota Medan, sesuai dengan kompetensinya masing-masing, karena pada dasarnya beban mengajar guru sangat bervariasi, dan penambahan fasilitas dan prasarana SMK, agar para siswa dapat belajar sesuai yang diharapkan dengan kebutuhan dunia kerja.

## **REFERENSI**

Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005, Tentang Standart Nasional Pendidikan.

Undang-undang No 14 Tahun 2003 Tentang Guru dan Dosen

PERMEN No. 22 Tahun 2006 Tentang Standart Isi

PERMEN No. 23 Tahun 2006 Tentang Standart Kelulusan

Soedijarto. 2008. Meningkatkan Mutu Pendidikan Nasional Sebagai Suatu Keharusan Bagi Dapat Terlaksananya Fungsi Konstitusional Sistem Pendidikan Nasional dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional " Pasca Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Jakarta.

A. World Bank Review. 1995. "Priorities and Strategies for Education" The World Bank Publication, Washinton D.C.

Martin Carnoy & H.M. Levin 1976 " Limits of Educational Reform. New York David Mc Kayco

Alfred Nord Whitehead. 1990. The Scinece And The Modern World.

Butler, F.C. 1979. *Instructional Systems Development for Vocational and Technical Training*. Englewood Cliffs, N.J.: Educational Technology Publication.

- 
- Calhoun, C.C., Finch, A.V. 1982. *Vocational Education: Concepts and Operations* (2nd ed.). Belmont, California: Wadworth Publishing Company.
- Chambers, J.H. 1983. *The Achievement of Education*. New York: Harper & Row.
- Evans, Rupert N. 1974. *Foundation of Vocational Education*. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Co.
- Finch, C.R., dan Crunkilton, J.R. 1984. *Curriculum Development in Vocational and Technical Education: Planning, Content and Implementation*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Nolker, H., dan Schoenfeldt, E. 1983. Pendidikan Kejuruan: Pengajaran, Kurikulum, dan Perencanaan. Terjemahan Agus Setiadi. Jakarta: PT Gramedia.
- Samani, Muchlas. 1991. *Keefektifan Pendidikan pada STM: Studi Pelacakan terhadap Lulusan STM di Kotamadya Surabaya*. Jakarta: PPS IKIP Jakarta.